

Kinerja Riset Perguruan Tinggi Kita

Hendra Gunawan

Seorang teman menulis pepatah: jika ingin membangun kota, dirikanlah sekolah; dan jika ingin membangun negeri, dirikanlah universitas. Saya menambahkan: jika ingin membangun negeri yang maju, dirikanlah universitas yang bermutu.

Saat ini, terdapat sekitar 3500 perguruan tinggi di Indonesia, tapi tak lebih daripada 100 perguruan tinggi yang dapat dikategorikan bermutu. Bahkan, bila produktivitas riset yang dijadikan ukuran utama mutu sebuah perguruan tinggi, maka angkanya lebih sedikit lagi. Berdasarkan data Scopus, yang merekam produktivitas perguruan tinggi dan lembaga lainnya dalam riset, hanya sekitar 10 perguruan tinggi kita yang layak diperhitungkan.

Terkait dengan rendahnya produktivitas perguruan tinggi kita dalam riset, baru-baru ini Forum Rektor Indonesia (FRI) mengusulkan pembentukan suatu kementerian yang menangani pendidikan tinggi, riset, dan teknologi. Dan pro-kontra pun terjadi. Daoed Joesoef (Kompas, 18/2/2014) termasuk yang tidak setuju dengan usulan tersebut, sementara Azyumardi Azra (Kompas, 26/2/2014) mendukung gagasan FRI. Namun, satu hal yang diamini oleh kedua belah pihak adalah bahwa kinerja riset perguruan tinggi kita memang rendah dan perlu ditingkatkan.

Mencoba untuk tidak terjebak dengan pro-kontra terhadap usulan FRI tersebut, melalui tulisan ini saya ingin mengajak semua pihak yang berkepentingan untuk melihat masalahnya secara jernih, dengan melupakan terlebih dahulu kementerian mana yang selayaknya mengelola pendidikan tinggi di negara kita.

Pertama, saya pikir kita sepakat bahwa rendahnya produktivitas riset perguruan

tinggi kita merupakan masalah yang serius, mengingat bahwa kita sekarang berada di era ilmu pengetahuan dan sehubungan dengan itu daya saing bangsa kita dipertaruhkan. Peran perguruan tinggi, khususnya universitas dan institut, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, memang sangat dinantikan.

Kedua, tentunya kita juga sepakat bahwa masalah ini harus segera diatasi. Namun, sebelum menawarkan solusinya, kita perlu mengetahui dengan baik akar masalahnya. Daoed Joesoef menyoroti tidak terbangunnya komunitas ilmiah di perguruan tinggi kita sebagai masalah utama. Sementara Azyumardi Azra risau dengan mayoritas dosen yang terpaksa pada salah satu misi perguruan tinggi saja, yaitu pengajaran.

Mencoba mendalami permasalahan ini, kita patut bertanya: apakah memang setiap "perguruan tinggi" yang ada di Indonesia mempunyai kapasitas untuk melaksanakan Tri Dharma PT? Sebagaimana kita ketahui, yang disebut "perguruan tinggi" di Indonesia terdiri dari universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi, termasuk sang pendatang baru yaitu "akademi komunitas".

Bila saya mengibaratkan ilmu pengetahuan sebagai buah kelapa, dan perguruan tinggi penghasil ilmu pengetahuan sebagai pohon kelapa, apakah betul semua bentuk "perguruan tinggi" tadi merupakan pohon kelapa yang akan berbuah kelapa? Menurut saya, sebagian di antaranya memang mirip pohon kelapa, tetapi bukan pohon kelapa. Apakah kemudian *fair* menuntut pohon palem yang mirip pohon kelapa untuk berbuah kelapa? Juga, apakah memindahkan pohon palem akan membuatnya kemudian berbuah kelapa? Tidak, 'kan?

Karena itu, marilah kita fokus pada "pohon kelapa" saja, khususnya universitas dan institut, yang seharusnya memang melaksanakan Tri Dharma PT secara utuh. Dalam hal ini, saya sepakat bahwa ada masalah dengan mutu dosen dan budaya akademik sekalipun di kedua jenis perguruan tinggi ini. Tetapi mengapa ini terjadi?

Saya sepakat dengan Azyumardi Azra bahwa saat ini ada masalah dalam perekrutan dan promosi dosen. Namun, di balik ini, negeri ini memang kekurangan orang yang mumpuni untuk menjadi dosen sebagaimana yang diharapkan oleh Azyumardi Azra dan kita semua. Hal ini diperparah dengan masalah *in-breeding* dan ketertutupan perguruan tinggi dalam perekrutan dosen, serta sistem promosi yang belum berbasis merit.

Berbicara tentang riset, kita pun tidak bisa melupakan berapa besarnya dana yang tersedia untuk itu. Di PTN, yang anggarannya diatur oleh APBN, anggaran untuk riset sangat minim, rata-rata masih di bawah Rp 10 miliar per tahun per perguruan tinggi. Di PTS, situasinya bahkan jauh lebih parah.

Dua pertanyaan kemudian menggelitik saya. Pertama, bila dibentuk kementerian baru yang menangani secara khusus pendidikan tinggi dan riset, apakah anggaran akan bertambah? Rasanya tidak, APBN kita tidak akan naik secara signifikan. Kedua, bila kita tiba-tiba mempunyai anggaran yang besar, apakah dana tersebut akan kita kucurkan untuk riset atau untuk membangun manusianya terlebih dahulu?

Belajar dari Korea Selatan dan China, beberapa puluh tahun silam mereka mengirimkan puluhan bahkan mungkin ratusan ribu sarjananya untuk mengambil program doktor di negara-negara maju, sebelum akhirnya mereka kembali dan membangun negeri mereka. Kita pernah melakukan hal serupa, tetapi tidak cukup untuk mencapai massa kritis (*critical mass*).

Bila kita ingin meningkatkan produktivitas riset perguruan tinggi, khususnya di universitas dan institut, barangkali kita perlu mengupayakan tercapainya massa kritis itu. Bila kita memang ingin membangun sebuah negara yang maju, bangunlah perguruan tinggi bermutu, dan untuk itu bangunlah terlebih dahulu manusianya!

Bandung, 26 Februari 2014